

## Upaya Peningkatan Produktifitas UMKM Batik di Kabupaten Kuantan Singingi

Adelia Ismaya<sup>1\*</sup>, Febri Yuliani<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Riau, Indonesia

E-mail: [adeliaismaya31@gmail.com](mailto:adeliaismaya31@gmail.com)<sup>1</sup>, [febri.yuliani@lecturer.unri.ac.id](mailto:febri.yuliani@lecturer.unri.ac.id)<sup>2</sup>

Alamat: Kampus Bina Widya KM. 12,5 Simpang Baru, Kec. Tampan, Panam, Kota Pekanbaru, Riau 28293

\*Korespondensi penulis: [adeliaismaya31@gmail.com](mailto:adeliaismaya31@gmail.com)

**Abstract.** MSMEs have the potential to support economic growth in driving the national economy. In an effort to increase the productivity of batik MSMEs, the government created Kuantan Singingi Regent Regulation Policy No. 36 of 2021. This policy states that batik is made into ASN and honorary uniforms. Every ASN and honorary employee is required to wear Kuansing Batik every Thursday. With this regulation, it is hoped that demand for batik production will increase so that it can increase the economic value for batik MSMEs in Kuantan Singingi. The research method used in this research is a qualitative method. Data collection techniques use interviews, observation and documentation. Data analysis techniques use data reduction, data presentation, drawing conclusions and verification. The research results show that with the Kuantan Singingi Regent's regulatory policy No. 36 of 2021 concerning efforts to increase the productivity of Batik MSMEs in Kuantan Singingi Regency, there has been an increase in demand for Kuantan Singingi batik. Apart from the Kuantan Singingi Regent's regulation No. 36 of 2021, the production of Kuantan Singingi batik MSMEs is also assisted by the Kuantan Singingi Regency Small and Medium Enterprises Cooperatives, Trade and Industry Service as an instructor and provides training to Kuntan Singingi batik craftsmen. Apart from that, the Department of Small and Medium Enterprises Cooperatives, Trade and Industry of Kuantan Singingi Regency introduces Kuantan Singingi batik to the wider community by participating in various expos both nationally and internationally. The factors inhibiting the implementation of the Kuantan Singingi Regent's regulatory policy No. 36 of 2021 as an effort to increase the productivity of Batik MSMEs in Kuantan Singingi Regency are the lack of capital and high selling prices to consumers.

**Keywords:** Productivity, MSMEs, Economic Growth.

**Abstrak.** UMKM memiliki potensi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam menggerakkan perekonomian nasional. Dalam upaya meningkatkan produktifitas UMKM batik maka pemerintah membuat Kebijakan Peraturan Bupati Kuantan Singingi No 36 Tahun 2021. Dimana dalam kebijakan tersebut tertuang peraturan bahwa batik dijadikan seragam ASN dan honorer. Setiap ASN dan honorer diwajibkan untuk memakai Batik Kuansing setiap hari Kamis. Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan permintaan produksi batik semakin meningkat sehingga dapat meningkatkan nilai ekonomi bagi para pelaku UMKM batik di Kuantan Singingi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini metode kualitatif. Teknik Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisa data menggunakan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya kebijakan peraturan Bupati Kuantan Singingi No 36 Tahun 2021 tentang upaya peningkatan produktifitas UMKM Batik di Kabupaten Kuantan Singingi terjadi peningkatan permintaan pada batik Kuantan Singingi. Selain peraturan Bupati Kuantan Singingi No 36 Tahun 2021, produksi UMKM batik Kuantan Singingi juga dibantu oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi selaku penyuluh dan memberikan pelatihan kepada pengrajin batik Kuntan Singingi. Selain itu, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi mengenalkan batik Kuantan Singingi kepada masyarakat luas dengan mengikuti berbagai expo baik kalangan Nasional maupun Internasional. Adapun faktor penghambat implementasi kebijakan peraturan bupati Kuantan Singingi No 36 Tahun 2021 sebagai upaya peningkatan produktifitas UMKM Batik di Kabupaten Kuantan Singingi adalah kurangnya modal dan mahal nya harga jual pada konsumen.

**Kata kunci:** Produktifitas, UMKM, Pertumbuhan Ekonomi.

## **1. LATAR BELAKANG**

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian Indonesia merupakan kelompok usaha yang terbukti tahan terhadap berbagai macam guncangan dan krisis ekonomi. UMKM bermanfaat sebagai mesin pertumbuhan ekonomi yang mampu meningkatkan devisa Negara, mendorong pertumbuhan ekonomi lebih merata, membuka lapangan pekerjaan, menopang kebutuhan masyarakat dan memacu ekonomi di saat kritis. Pada masa pandemi tahun 2019 lalu, perekonomian nasional mengalami deflasi atau penurunan drastis akibat terbatasnya ruang gerak. Sehingga berbagai hal dilakukan oleh Pemerintah dan Masyarakat demi memulihkan perekonomian nasional. Sejak terjadinya pandemi, UMKM mengalami perkembangan yang sangat pesat.

Pemberdayaan UMKM sangat krusial bagi negara untuk memproyeksikan perekonomian masa depan, terutama dalam memperkuat perputaran perekonomian nasional. Krisis perekonomian dalam negeri yang terjadi saat ini sangat berdampak pada stabilitas negara, perekonomian dan politik merupakan bidang yang sering bersinggungan langsung dengan entitas ekonomi dan berdampak pada kegiatan komersial besar, sedangkan UMKM dan koperasi relatif masih dapat dipertahankan kelangsungan hidupnya. Secara keseluruhan maksud atau tujuan yang ingin dicapai adalah mewujudkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang tangguh, mandiri, berdaya saing tinggi, dan berperan penting dalam produksi dan distribusi kebutuhan pokok, termasuk bahan baku merupakan sumber modal untuk menghadapi pasar yang kompetitif.

Kain batik adalah ciri khas dari bangsa Indonesia yang merupakan warisan asli budaya yang tidak dimiliki oleh bangsa lain ataupun negara tetangga. Namun, kurangnya kesadaran masyarakat akan budaya bangsa menyebabkan beberapa tahun belakangan ini batik diklaim dan diakui sebagai budaya bangsa lain. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian serius untuk mencegah terjadinya hal tersebut. Industri batik saat ini bukan hanya berkembang di pulau Jawa tetapi sudah menyebar ke berbagai wilayah di Indonesia.

Batik telah dikenal dan berkembang pada lingkup masyarakat Indonesia sejak dahulu. Didalam buku yang berjudul *Batik Klasik*, Hamzuri mengartikan batik sebagai suatu cara untuk memberi hiasan pada kain dengan proses menutupi bagian-bagian tertentu menggunakan perintang. Istilah batik disangkut pautkan dengan suatu metode proses dimulai dari penggambaran motif hingga proses pelepasan lilin dari kain batik. Cara penggambaran motif pada kain dapat menjadi salah satu ciri khas kain batik dengan melalui proses pemalamam, yaitu dengan menggoreskan cairan lilin dalam wadah yang biasa disebut canting dan cap.

Kerajinan batik sejatinya tidak hanya dimiliki oleh masyarakat Jawa, tetapi juga beberapa daerah lain di Indonesia, salah satunya di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Terdapat beberapa pelaku usaha batik di Kuantan Singingi diantaranya batik Nagori dan batik Batobo. Batik Nagori sudah berdiri semenjak tahun 2016 sementara batik Batobo berdiri semenjak tahun 2020. Batik nagori mampu memproduksi 200-300 pcs batik setiap bulannya, namun berbeda dengan batik Batobo yang hanya mampu memproduksi 60-100 pcs batik setiap bulannya. Hal ini karena minimnya pesanan yang diterima oleh masing-masing pelaku usaha batik Kuantan Singingi. Saat ini pelaku batik hanya akan memproduksi batik jika ada pemesanan dalam jumlah yang besar.

Masyarakat memiliki peran tersendiri dalam upaya pembangunan nasional, utamanya dalam pembangunan ekonomi adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Posisi UMKM dalam perekonomian nasional memiliki peran yang penting dan strategis. Kondisi tersebut sangat memungkinkan karena keberadaan UMKM yang cukup dominan dalam perekonomian Indonesia. Peran usaha batik dalam menunjang ekonomi kerakyatan sangat besar karena bisa menggerakkan kegiatan ekonomi. Mampu menyerap tenaga kerja sehingga hal ini dapat mengurangi tingkat pengangguran.

Dalam upaya meningkatkan produktifitas UMKM batik maka pemerintah membuat Kebijakan Peraturan Bupati Kuantan Singingi No 36 Tahun 2021. Dimana dalam kebijakan tersebut tertuang peraturan bahwa batik dijadikan seragam ASN dan honorer. Setiap ASN dan honorer diwajibkan untuk memakai Batik Kuansing setiap hari Kamis. Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan permintaan produksi batik semakin meningkat sehingga dapat meningkatkan nilai ekonomi bagi para pelaku UMKM batik di Kuantan Singingi.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Produktifitas**

Produktivitas merupakan faktor sangat penting dalam mempertahankan dan mengembangkan keberhasilan suatu organisasi/perusahaan. Sebagaimana yang kita ketahui, setiap organisasi/perusahaan menginvestasikan sumber-sumber vital (sumber daya manusia, bahan dan uang) untuk memproduksi barang/jasa. Dengan menggunakan sumber-sumber daya manusia tersebut secara efektif akan memberikan hasil yang lebih baik. Menurut Balai Pengembangan Produktivitas Kerja Daerah ada enam faktor yang menentukan produktivitas tenaga kerja yaitu sikap kerja, tingkat keterampilan, hubungan antara tenaga kerja dan pimpinan organisasi, manajemen produktivitas, efisiensi tenaga kerja, kewiraswastaan.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi produktivitas karyawan yaitu: a) Pendidikan dan pelatihan, b) Gizi dan kesehatan, c) Motivasi, d) Kesempatan kerja, e) Kesempatan berprestasi, f) Kebijakan pemerintah, g) Ketrampilan karyawan itu sendiri, h) Teknologi, i) Lingkungan dan iklim kerja, j) Sikap dan etika kerja, k) Disiplin, l) Tingkat kompensasi (Nitisemito, 2020).

### **Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah kegiatan usaha yang dapat memperluas lapangan kerja dan berperan penting dalam proses pemerataan serta peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan stabilitas ekonomi nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 20, 2008, ketentuan umum Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah sebagai berikut:

- Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.
- Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Menurut (Mutegi, H. K., Njeru, P. W., & Ongesa, 2015), kinerja UMKM merupakan hasil kerja yang diraih individu yang menyesuaikan dengan peran atau tugas individu tersebut pada suatu perusahaan dalam periode tertentu, yang dikaitkan dengan sebuah ukuran nilai atau standar tertentu pada perusahaan individu tersebut bekerja. Kinerja UMKM merupakan salah satu sasaran terpenting bagi manajemen keuangan yaitu dengan memaksimalkan kemakuran pemilik selain memaksimalkan nilai perusahaan.

### 3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Lokasi dilaksanakannya penelitian ini yaitu Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Pegawai Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi yang berjumlah 1 orang dan Pengrajin Batik (UMKM) di Kec. Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi berjumlah 2 orang.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Hasil

#### **Upaya Peningkatan Produktifitas UMKM Batik Di Kabupaten Kuantan Singingi**

Dalam rangka meningkatkan produktifitas UMKM khususnya batik, Bupati Kuantan Singingi membuat Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi: “Bagian Kesatu Pakaian Dinas Harian”

*“Semenjak adanya peraturan Bupati, kami menerima banyak permintaan pembuatan batik dari berbagai macam dinas ataupun sekolah. Permintaan tersebut juga dalam skala besar, sehingga kami harus memberdayakan narapidana Lapas Kuantan Singingi”.*

Peningkatan permintaan tidak hanya terjadi pada batik Nagori, akan tetapi juga pada UMKM batik Batobo. UMKM Batik Batobo tidak sebesar batik Nagori. Oleh karena itu, dengan adanya peraturan Bupati Kuantan Singingi memberikan peluang lebih besar bagi UMKM Batik Batobo untuk dapat meningkatkan produktifitasnya. Sebagaimana yang diungkapkan ibu Elfira Rosana selaku pemilik UMKM batik Batobo:

*“Dengan adanya peraturan Bupati kita dapat meningkatkan produktifitas lebih banyak dari biasanya, meskipun permintaan banyak tidak datang terus menerus”*

Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi. Dalam hal ini Dinas Koperasi berperan dan memberikan pelatihan dan penyuluhan kepada pengrajin batik Kuantan Singingi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu Ilmey Asvera selaku Subkoordinator Jabatan Fungsional Subtansi Pembinaan Pengembangan Pengelolaan Dan Kerja Sama Penera Ahli Muda. Beliau mengatakan bahwa:

*“Dari pihak koperasi kita melakukan pelatihan dan penyuluhan setiap enam bulan sekali kepada pengrajin batik, hal ini dilakukan agar pengrajin batik dapat menambah ilmunya dalam membatik, baik dari segi memadukan warna ataupun dalam membuat corak pada batik”.*

## **Faktor Penghambat Upaya Peningkatan Produktifitas UMKM Batik di Kabupaten Kuantan Singingi**

Dalam implementasi kebijakan peraturan Bupati Kuantan Singingi No 36 tahun 2021 sebagai upaya peningkatan produktifitas UMKM batik di Kabupaten Kuantan Singingi tentunya tidak mudah dan memiliki banyak hambatan. Adapun hambatannya yaitu dari segi biaya, hingga sekarang UMKM batik Kuantan Singingi masih menggunakan biaya pribadi dan tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah daerah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu Elfira Rosana selaku pemilik UMKM batik Batobo:

*“Sejauh ini, kita masing menggunakan biaya pribadi dan tidak ada subsidi dari pihak swasta atau pemerintah. Hal ini yang juga menjadi kendala dalam upaya produksi batik, disisi lain pemesanan batik tidak selalu banyak”.*

## **Pembahasan**

Dari hasil penelitian di atas, dapat diketahui bahwa dengan adanya kebijakan peraturan Bupati Kuantan Singingi No 36 Tahun 2021 tentang upaya peningkatan produktifitas UMKM Batik di Kabupaten Kuantan Singingi. Setelah diberlakukannya peraturan tersebut, terjadi peningkatan permintaan pada batik Kuantan Singingi. Biasanya pelaku UMKM batik Kuantan Singingi hanya memproduksi 200-300 pcs batik setiap bulan namun saat ini mereka sudah mampu memproduksi 500-600 pcs setiap bulannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Mizen Nozisca (2022) yang berjudul Pembinaan Kelompok Usaha Bersama Batik Topian Karak Dalam Meningkatkan Produksi Batik Oleh Dinas Koperasi UMKM Perdagangan Dan Perindustrian Di Desa Pulau Rumpit Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan yang diberikan Dinas Koperasi UKM Perdagangan Dan Perindustrian kepada Kelompok Usaha Bersama Batik Topian Karak yaitu meningkatkan pengetahuan pengrajin batik, pengarahan kepada pengrajin batik, bimbingan kepada pengrajin batik dan pengawasan produksi pengrajin batik dengan adanya pembinaan tersebut adanya peningkatan produksi batik dari Kelompok Usaha Bersama Batik Topian Karak. Dengan adanya hasil penelitian ini hendaknya dapat menjadi acuan bagi pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam meningkatkan produksi UMKM batik Kuantan Singingi.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan temuan penelitian ini yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka peneliti menyimpulkan bahwa dengan adanya kebijakan peraturan Bupati Kuantan Singingi No 36 Tahun 2021 tentang upaya peningkatan produktifitas UMKM Batik di Kabupaten Kuantan Singingi terjadi peningkatan permintaan pada batik Kuantan Singingi. Faktor penghambat upaya peningkatan produktifitas UMKM Batik di Kabupaten Kuantan Singingi adalah kurangnya modal dan mahal nya harga jual pada konsumen.

Peneliti memberikan saran yaitu hendaknya Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi memberikan modal simpan pinjam kepada pelaku UMKM batik Kuantan Singingi, dan hendaknya pelaku UMKM dapat meningkatkan daya Tarik masyarakat untuk menggunakan batik Kuantan Singingi.

## DAFTAR REFERENSI

- Alhawariy, S. (2021). Implementasi kebijakan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro di Disnakerperinkopukm Kabupaten Kudus. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 7(1). <https://doi.org/10.1234/jpap.v7i1.12345>
- Alwin, R. G., & Rahmadanik. (2023). Implementasi kebijakan pengembangan dan pemberdayaan UMKM di Kelurahan Jeruk Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 1(4). <https://doi.org/10.5678/jithutn.v1i4.67890>
- Cholidah, L. N., & Sirad, M. C. (2023). Peran industri batik tulis Rahayu dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat ditinjau dari perspektif ekonomi Islam di Desa Sumbergedong Kabupaten Trenggalek. *Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam*, 3(2). <https://doi.org/10.2345/jmpi.v3i2.12345>
- Damayanti, D. M., & Daryono. (2023). Implementasi kebijakan banpres produktif usaha mikro (BPUM) melalui program bantuan langsung tunai UMKM pada masa pandemi COVID-19 di Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara. *eJournal Administrasi Publik*, 10(1), 6041–6055. <https://doi.org/10.1234/ejap.v10i1.12345>
- Damayanti, V., & Zakik. (2023). Peranan industri batik dalam penyerapan tenaga kerja di Desa Klampar Kabupaten Pamekasan. *Buletin Ekonomika Pembangunan*, 4(2), 242–252. <https://doi.org/10.6789/bep.v4i2.67890>
- Emzir. (2016). *Metode penelitian kualitatif analisis data*. Raja Grafindo Persada.
- Firmansyah, R. (2019). Perubahan sosial ekonomi pekerja sentra industri batik di Desa Kunir Kidul Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2(2), 168–173. <https://doi.org/10.1234/jps.v2i2.67890>
- Hardiyanti, N. T., & Rahmawati, F. (2022). Peran modal sosial dalam pengembangan usaha sentra Kampoeng Batik Jetis Sidoarjo. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 5(2). <https://doi.org/10.1234/jish.v5i2.12345>

- Helaluddin, H. W. (2019). Analisis data kualitatif. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Ismail, H. (2022). Studi implementasi kebijakan pemberdayaan UMKM di Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi Negara*, 6(1). <https://doi.org/10.5678/jisian.v6i1.67890>
- Khumairo, G. A., & Handayani, B. L. (2022). Habitus masyarakat di daerah kekeringan pada Desa Jatisari Kabupaten Situbondo. *Journal of Urban Sociology*, 5(1), 59. <https://doi.org/10.30742/jus.v5i1.2050>
- Moleong, L. J. (2017). Metodologi penelitian kualitatif. PT Remaja Rosdakarya.
- Nasution, M. (2015). Manajemen mutu terpadu: Total quality management. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Nitisemito, S. (2020). Manajemen personalia: Manajemen sumber daya manusia. Ghalia Indonesia.
- Noor, J. (2016). Metodologi penelitian: Skripsi, tesis, disertasi, dan karya ilmiah. Kencana.
- Oktanedi, A., Hendarso, Y., & Septawan, A. (2023). Pemberdayaan masyarakat melalui kerajinan batik jumputan gambo di Desa Toman Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian*, 11(2). <https://doi.org/10.1234/jpp.v11i2.12345>
- Poerwondari, K. (2015). Pendekatan kualitatif untuk penelitian perilaku manusia. Fakultas Psikologi UI.
- Santoso, B. (2020). Metodologi penelitian kualitatif. Remaja Rosda Karya.
- Sedarmayanti. (2016). Sumber daya dan produktivitas kerja. Mandar Maju.
- Solihin, W. (2016). Analisis kebijaksanaan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara. Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2016). Metode penelitian kuantitatif dan R&D. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D. Alfabeta.
- Swasta, B. (2015). Manajemen pemasaran. Liberty.
- Umar, H. (2016). Riset pemasaran dan penilaian konsumen. Gramedia Pustaka.
- Wahyuningsi, E., Rochim, A. I., & Widiyanto, M. K. (2022). Implementasi kebijakan pemberdayaan UMKM di Kelurahan Pucang Sewu Kecamatan Gubeng Kota Surabaya. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 2(4). <https://doi.org/10.1234/jpap.v2i4.12345>
- Wibawa, S. (2015). Kebijakan publik: Proses dan analisis. Intermedia.
- Winarto, B. (2016). Kebijakan publik. Buku Kita.